

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.500 pulau dan memiliki garis panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (18.000km²) sehingga luas wilayah Indonesia 2/3 merupakan wilayah lautan. Dengan potensi wilayah tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menuju Indonesia yang maju dan makmur (Solikhin,dkk : 2005).

Tetapi sayangnya potensi kelautan yang ada tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia di masa orde baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan (pembudidaya ikan dan nelayan) karena kebijakan orde baru yang tidak menitikberatkan pada pembangunan perikanan khususnya di perikanan tangkap yang menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan dan produksi perikanan.

Selaras dengan hal tersebut untuk mengatasi permasalahan di bidang perikanan tangkap dan menunjang keberhasilan Revitalisasi Perikanan yang dicanangkan oleh Presiden SBY (Kompas : 2005) maka Departemen Kelautan dan Perikanan mencoba menitikberatkan pada pembangunan perikanan budidaya melalui melaksanakan program unggulan yaitu Propekan (Program Peningkatan Ekspor Perikanan), Proksimas (Program Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat) dan Prolinda (Program Perlindungan Sumberdaya Alam), di mana salah satu kebijakan pendukung yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral (Ditejen) Perikanan Budidaya salah satunya adalah melalui Program Dana Penguatan Modal Melalui Mekanisme Pinjaman bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil.

Program ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006 melalui anggaran dekon (APBN) di mana tata cara, persyaratan dan pengukuran keberhasilan program diatur dalam Juklak Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya DKP RI.

Program dana penguatan modal ini bertujuan agar pembudidaya ikan dapat meningkatkan produktivitasnya dan timbulnya kepercayaan lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman permodalan, sehingga untuk masa yang akan datang Pembudidaya Ikan secara bertahap dapat tumbuh berkembang menjadi besar dan mandiri serta tidak bergantung dengan program Pemerintah terutama dalam masalah permodalan.

Sebelum adanya program dana penguatan modal ini Ditjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2003 mempunyai program BUPEDES (Budidaya Perikanan Pedesaan) yaitu program dana bergulir untuk masyarakat perikanan pedesaan, di mana Provinsi Lampung mendapatkan alokasi dana Bupedes sebesar Rp.1.672.500.000,- yang diperuntukkan bagi 5 Kab/Kota di provinsi Lampung yaitu Lampung Barat, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara dan Way Kanan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Dana Bupedes 2003

No.	Kab/Kota	Alokasi Anggaran Rp.(000)	Pengembalian	
			Rp. (000)	%
1.	Lampung Barat	339.000		
2.	Metro	248.500	49.700	20%
3.	Lampung Tengah	362.500		
4.	Way Kanan	339.500		
5.	Lampung Utara	383.000		
		1.672.500	49.700	

sumber : Laporan Tahunan Budidaya DKP Provinsi Lampung TA 2006

Dari hasil evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ternyata hanya Pembudidaya Ikan di Kota Metro yang dapat mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 20 % dari total pengembalian, sedangkan 4 Kabupaten lainnya tidak ada sama sekali dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Monev Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Lampung hal ini disebabkan karena modal yang

diberikan ke pembudidaya ikan ternyata tidak diperuntukkan bagi pengembangan usaha budidaya perikanannya tetapi digunakan untuk hal – hal lain seperti untuk uang muka membeli kendaraan (motor) dan konsumsi lainnya serta adanya anggapan pola pikir yang salah dari masyarakat di mana menganggap bahwa program yang diberikan oleh Pemerintah merupakan bantuan sehingga tidak harus dikembalikan selain itu kebijakan program tersebut lebih bernuansa politis yaitu program menjelang pemilu dan keharusan bagi dinas agar anggaran yang diberikan wajib dihabiskan.

Berdasarkan hal tersebut pada Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengusulkan Kota Metro sebagai penerima program dana penguatan modal ini, hal ini disebabkan karena kondisi geografis yang mendukung untuk pengembangan usaha budidaya air tawar dengan menggunakan media kolam serta sebagai prestasi pada pelaksanaan Program Bupedes.

Adapun usaha budidaya ikan yang dilakukan di Kota Metro dilaksanakan oleh Pembudidaya ikan skala kecil dengan jenis usahanya budidaya ikan lele dan menggunakan teknologi sederhana yaitu memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan budidaya dengan menggunakan terpal plastik sebagai kolam ikan.

Selain hal tersebut Pemerintah Kota Metro sangat mendukung kegiatan perikanan budidaya yang ada di Kota Metro dengan pola pengembangan kawasan dan akan menjadikan Kota Metro menjadi Sentra Kawasan Pengembangan Budidaya Lele.

Kegiatan usaha budidaya air tawar di Kota Metro diprioritaskan pada usaha budidaya ikan lele hal ini dikarenakan karena kondisi Kota Metro yang hanya memiliki Luas wilayah total sebesar 68,74 KM² dan yang dipergunakan untuk usaha budidaya perikanan hanya sebesar 117 Ha dari luas wilayah secara keseluruhan, di mana dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Potensi Budidaya Air Tawar (kolam) Tahun 2007

No	Kegiatan Usaha	Potensi Areal (Ha)	Potensi Terpasang Areal (Ha)	Tingkat Pemanfaatan	Peluang Potensi Budidaya	
					(Ha)	(%)
1	<u>Budidaya air Tawar Prov</u> Kolam	6.721,8	6.721,8	6.009,9	711,9	10,59
2	<u>Budidaya air Tawar Metro</u> Kolam	117	117	85,8	31,2	26,7

sumber : Statistik Budidaya Provinsi Lampung TA 2007

Hal tersebut yang menyebabkan Pemerintah Kota Metro mengembangkan usaha budidaya perikanan dengan fokus usaha budidaya ikan lele karena usaha budidaya ikan lele ini tidak terlalu susah dibandingkan dengan usaha budidaya ikan lainnya serta dapat dilakukan dengan luas lahan yang sempit dan sederhana seperti dengan menggunakan kolam yang terbuat dari terpal dan ditempatkan di areal pekarangan.

Dari potensi perikanan budidaya di Kota Metro sebesar 117 Ha sampai dengan tahun 2009 ini tingkat pemanfaatannya sudah sebesar 85,8 Ha, di mana sebelum adanya program dana penguatan modal ini produksi budidaya pada Tahun 2006 tingkat pemanfaatan sebesar 83,8 Ha adalah sebesar 926 Ton/Thn sedangkan setelah adanya program ini pada tahun 2007 tingkat pemanfaatan meningkat menjadi 85,8 Ha dengan peningkatan produksi sebesar 1281 Ton/Thn (38,3 %) dan tingkat produktifitas pada tahun 2006 sebesar 11,05 ton/ha/tahun dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 14,9 ton/ha/tahun, di mana dapat terlihat dalam tabel 3 :

Tabel 3. Produksi dan Produktivitas Budidaya Air Tawar Kota Metro

No	Tahun	Luas Areal (Ha)	Kegiatan Usaha Budidaya Kolam	
			Produksi (Ton/Th)	Produktivitas (Ton/Ha/Th)
1	2006	83,8	926	11,05

(Sambungan Tabel 3)

2	2007	85,8	1281	14,9
---	------	------	------	------

sumber : Statistik Budidaya Provinsi Lampung TA 2007

Berdasarkan dengan pelaksanaan program dana penguatan modal dari data UPP bahwa terdapat 30 orang pembudidaya pada 8 pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) yang mendapatkan dana pinjaman ini yaitu:

Tabel 4. Daftar Pokdakan Penerima DPM di Kota Metro

No	Kelompok Penerima	Jumah Pinjaman (Rp)	Sisa Pengembalian (Rp)
1	Kerto Basuki	11.580.000	9.980.000
2	Mina Sari	8.685.000	-
3	Tunas Maju	11.580.000	5.252.203
4	Usaha Muda	8.685.000	2.285.000
5	Mina Jaya	11.580.000	-
6	Yosomino 21	11.580.000	3.813.400
7	Bina Mulya	11.580.000	9.580.000
8	Sidomaju I	11.580.000	-
	Jumlah	86.850.000	27.801.071

Sumber : Laporan UPP Kota Metro TA 2009

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari 8 kelompok penerima dana penguatan modal ini ternyata hanya 3 kelompok yang dapat melunasi 100%, sedangkan sisa 5 kelompok walaupun mengangsur tetapi belum dapat melunasi 100% dan berdasarkan jumlah dana yang ada di DIPA dan telah masuk ke rekening giro UPP sebesar Rp.90.000.000,- di mana tiap – tiap orang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.3.000.000,-/orang.

Selain itu terlihat bahwa jumlah dana yang diterima oleh pembudidaya ikan di Kota Metro tidak sesuai dengan jumlah dan yang diagunkan oleh pemerintah melalui UPP, di mana dan yang dicairkan hanya sebesar Rp.86.850.000,- dari dana Rp.90.000.000,-

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dana penguatan modal (DPM) bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro terdapat permasalahan – permasalahan yang terjadi antara lain :

- a. seperti jumlah dana yang diterima oleh pembudidaya tidak sesuai dengan dana yang diajukan di mana jumlah dana yang dipinjamkan oleh BRI Metro ke Pokdakan Metro tidak sesuai dengan dana yang dicairkan ke Rekening Giro UPP Kota Metro
- b. dari segi produksi mengalami peningkatan tetapi dari segi pengembalian DPM ke perbankan oleh pembudidaya ikan di Kota Metro hanya 3 kelompok yang dapat melunasi pinjaman sehingga hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil topik tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro?
2. Dampak apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan program dana penguatan modal ini ?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah melihat efektifitas dari Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal Melalui Mekanisme Pinjaman Bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil (APBN TA 2006) di Kota Metro, Provinsi Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis proses pelaksanaan program dana penguatan modal di Kota Metro
- b. Menganalisis dampak dari implementasi pelaksanaan program dana penguatan modal di Kota Metro

1.5. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain yaitu :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan RI melalui Ditjen Perikanan Budidaya tentang pelaksanaan program Dana Penguatan Modal bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil
2. Memberikan masukan bagi perencana program dalam pembuatan kegiatan selanjutnya.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan agar lebih sistematis, maka penulisan tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Literatur yang terdiri dari tinjauan pustaka, tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menambah wawasan dalam mendukung analisis yang akan digunakan.

Bab III, Gambaran Umum Kegiatan terdiri dari gambaran umum kegiatan DPM, Mekanisme Kegiatan dan Indikator keberhasilan.

Bab IV, Metodologi Pengukuran Evaluasi terdiri dari pendekatan penelitian, variabel dan definisi operasional, data dan sumber data

Bab V, Hasil dan Pembahasan berisi hasil temuan dan menganalisis hasil temuan penelitian tersebut

Bab VI, Kesimpulan dan Saran terdiri dari poin – poin hasil pembahasan dan saran berupa rekomendasi kebijakan

